

# PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2016

(Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I  
Nomor 4618 K/80/MEM/2015, tanggal 24 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Konsultasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Penghasil Tahun 2016 Nomor 496/SD.I/DIT.IV/X/Keuda tanggal 20 Oktober 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2016.**

**K E S A T U :**

Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi untuk tahun 2016 direncanakan sebagai berikut:

- a. untuk daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi sejumlah 7 (tujuh) Provinsi, 58 (lima puluh delapan) Kabupaten, dan 6 (enam) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- b. untuk daerah penghasil sumber daya alam gas bumi sejumlah 6 (enam) Provinsi, 39 (tiga puluh sembilan) Kabupaten, dan 6 (enam) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**K E D U A :**

Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah *lifting* minyak dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di daerah bersangkutan.

**K E T I G A :**

Penetapan daerah penghasil sumber daya

alam minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Daerah penghasil untuk Wilayah Kerja di daratan (*onshore*) adalah kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara; dan
- b. Daerah penghasil untuk Wilayah kerja di lepas pantai (*offshore*) adalah provinsi atau kabupaten/kota yang di dalam Wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**K E E M P A T :**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2015  
N I E N T E R I E N E R G I D A N S U M B E R D A Y A M I N E R A L  
R E P U B L I K I N D O N E S I A ,  
ttd.  
S U D I R M A N S A I D

**Tembusan:**

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan

LAMPIRAN I

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL  
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI TAHUN 2016

NO	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>24534937</b>
<b>I</b>	<b>Aceh</b>		<b>1.725,11</b>
		1. Kab. Aceh Utara	677,27
		2. Kab. Aceh Tamiang	1.047,84
<b>II.</b>	<b>Sumatera Utara</b>		<b>385,59</b>
		1. Kab. Langkat	323,56
		2. Kota Binjai	0,19
		3. Kab. Deli Serdang	0,00
		4. Kab. Padang Lawas	61,84
<b>III</b>	<b>Riau</b>		<b>99.465,39</b>
		1. Kab. Bengkalis	50.715,78
		2. Kab. Indragiri Hulu	724,13
		3. Kab. Kampar	11.369,06
		4. Kab. Rokan Hulu	470,37
		5. Kab. Rokan Hilir	16.844,24
		6. Kab. Siak	17.576,43
		7. Kab. Pelalawan	491,06
		8. Kab. Kep. Meranti	1.274,31
<b>IV</b>	<b>Kep. Riau</b>		<b>7453930</b>
		1. Kab. Natuna	4965,94
		2. Kab. Kep. Anambas	2.673,96
<b>V</b>	<b>Jambi</b>		<b>7.478,40</b>
		1. Kab. Batang Hari	271,46
		2. Kab. Muaro Jambi	1.018,17
		3. Kota Jambi	384,65
		4. Kab. Tanjung Jabung Timur	980,33
		5. Kab. Tanjung Jabung Barat	3.629,72
		6. Kab. Sarolangun	866,915
		7. Kab. Tebo	327,13
<b>VI</b>	<b>Sumatera Selatan</b>		<b>251.170,43</b>
		1. Kab. Lahat	134,91
		2. Kab. Muara Enim	3.777,29
		3. Kota Prabumulih	1.030,80
		4. Kab. Musi Banyuasin	9.950,01
		5. Kab. Banyuasin	1.796,97
		6. Kab. Musi Rawas	1.825,97
		7. Kab. Ogan Ilir	1.414,11
		8. Kab. Ogan Komering Ulu	793,69
		9. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.868,68
		10. Kab. Musi Rawas Utara	578,02

VII	Lampung		1.975,77
		Kab. Lampung Timur	1.975,77
VIII	Jawa Barat		<b>3391516</b>
		1. Kab. Indramayu	2.071,20
		2. Kab. Karawang	559,74
		3. Kab. Majalengka	108,59
		4. Kab. Subang	281,08
		5. Kab. Bekasi	871,14
			<b>40632</b>
IX	Jawa Tengah		406,912
		Kab. Blora	<b>157.557,53</b>
X	Jawa Timur		653.125,80
		1. Kab. Bojonegoro	455,61
		2. Kab. Bangkalan	430,85
		3. Kab. Tuban	13,93
		4. Kab. Sidoarjo	1.531,34
		5. Kab. Gresik	<b>1.330,01</b>
XI	Kalimantan Selatan		1.295,88
		1. Kab. Tabalong	34,12
		2. Kab. Balangan	<b>17.715,72</b>
XII	Kalimantan Timur		198,44
		1. Kota Samarinda	15.217,91
		2. Kab. Kutai Kertanegara	587,00
		3. Kab. Kutai Timur	99091
		4. Kab. Penajam Paser Utara	821,47
		5. Kota Bontang	<b>3.231</b>
XIII	Kalimantan Utara		1.935,16
		1. Kab. Bulungan	497,43
		2. Kab. Nunukan	794,47
		3. Kota Tarakan	4,28
		4. Kab. Tana Tidung	<b>1.071,83</b>
XIV	Kalimantan Tengah		0,93
		1. Kab. Barito Timur	1.070,90
		2. Kab. Barito Utara	<b>2.002,43</b>
XV	Sulawesi Tengah		433,65
		1. Kab. Morowali Utara	1.568,78
		2. Kab. Banggai	<b>137036</b>
XVI	Maluku		1.270,36
		Kab. Seram Bagian Timur	<b>5.130,99</b>
XVII	Papua Barat		2.129,45
		1. Kab. Teluk Bintuni	2.571,17
		2. Kab. Sorong	430,37
		3. Kab. Raja Ampat	<b>3042235</b>
B	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	3.837,97
		1. Lampung	465,98
		2. Kep. Bangka Belitung	7.965,28
		3. Jawa Barat	12.177,88
		4. Kalimantan Timur	279,35
		5. Kepulauan Riau	1.594,99
		6. Jawa Timur	3.800,80
		7. DKI Jakarta	<b>238.221,13</b>
C	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 ttd.  
 SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN II

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI  
 HASIL SUMBER DAYA ALAM GAS BUMI TAHUN 2016

NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MHBTU)
1	2	3	4
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	1.715.391,85
I	Aceh		7.666,48
II	Sumatera Utara	Kab. Aceh Utara 7.666,48	2.382,88
III	Riau	1. Kab. Langkat 2. Kota Binjai 3. Kab. Deli Serdang	2.050,17 3332,71
IV	Kep. Riau	1. Kab. Kampar 2. Kab. Pelalawan 3. Kab. Kep. Meranti 4. Kab. Siak	2.816,64 17.903,72 2.362,41 8.339,57
V	Jambi	1. Kab. Natuna 2. Kab. Kep. Anambas	64.054,91 34.491,11
VI	Sumatera Selatan	1. Kab. Muaro Jambi 2. Kab. Tanjung Jabung Timur 3. Kab. Tanjung Jabung Barat	2.382,88 12.168,52 42.417,76
VII	Jawa Barat	1. Kab. Lahat 2. Kab. Muara Enim 3. Kota Prabumulih 4. Kab. Musi Banyuasin 5. Kab. Musi Rawas 6. Kab. Ogan Komering Ulu 7. Kab. Ogan Ilir 8. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5.603,85 675.851,44 11.662,26 382.843,90 101.882,03 4.363,64 65,08 315,98
		1. Kab. Indramayu 2. Kab. Karawang 3. Kab. Majalengka 4. Kab. Subang	89.471,80 19.810,54 20.208,07 581,79 36.431,12

VIII	Jawa Tengah	5. Kab. Bekasi	12.440,27
			<b>16.878,73</b>
IX	Jawa Timur	1. Kab. Blora	16.084,44
		2. Kota Semarang	794,29
			<b>21.392,02</b>
X	Kalimantan Timur	1. Kab. Bojonegoro	2.717,01
		2. Kab. Bangkalan	1.147,32
		3. Kab. Sumenep	2.479,24
		4. Kab. Sidoarjo	5.326,90
		5. Kab. Gresik	9.721,55
			<b>283.340,31</b>
XI	Kalimantan Utara	1. Kota Samarinda	1.648,70
		2. Kab. Kutai Kertanegara	274.686,65
		3. Kab. Penajam Paser Utara	5.498,40
		4. Kota Bontang	1.506,56
			<b>5.456,86</b>
XII	Kalimantan Tengah	1. Kab. Bulungan	1.787,16
		2. Kab. Nunukan	2.645,86
		3. Kota Tarakan	1.023,83
			<b>4.927,30</b>
XIII	Sulawesi Selatan	Kab. Barito Utara	4.927,30
			<b>31.273,39</b>
XIV	Sulawesi Tengah	Kab. Wajo	31.273,39
			<b>125.292,84</b>
XV	Papua Barat	Kab. Banggai	125.292,84
			<b>366.283,54</b>
		1. Kab. Teluk Bintuni	363.908,57
		2. Kab. Sorong	2.374,97
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	<b>Provinsi</b>	<b>379.955,25</b>
		1. Lampung	11.052,02
		2. Jawa Barat	42.671,27
		3. Kalimantan Timur	212.853,59
		4. Kepulauan Riau	62.661,96
		5. Jawa Timur	39.390,58
		6. DKI Jakarta	11.325,83
C.	Pemerintah Pusat pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>357.124,67</b>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 SUDIRMAN SAID

( BN )